



KR-Antara/Hendra Nurdiansyah

SUPLAI MAGMA GUNUNG MERAPI: Guguran lava pijar Gunung Merapi terlihat dari Srumbung, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (29/2/2024). Menurut data BPPTKG periode pengamatan 28 Februari 2024 pukul 00.00 - 24.00 WIB telah terjadi sembilan kali guguran lava dengan jarak luncur maksimal 1.300 meter dan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran Gunung Merapi.

SELEKSI HAKIM AGUNG DAN HAKIM AD HOC HAM MA

153 Calon Lolos Tahap Pertama

JAKARTA (KR) - Komisi Yudisial (KY) mengumumkan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM Mahkamah Agung (MA) tahun 2024 yang dinyatakan lolos dalam tahap pertama, yakni seleksi administrasi. Total jumlah pendaftar yang masuk terdapat sebanyak 281 orang.

Setelah melalui seleksi administrasi, jumlah calon yang diterima sebanyak 153 peserta terdiri dari peserta calon hakim agung sebanyak 133 orang dan peserta calon hakim ad hoc HAM sebanyak 20 orang.

"Selamat kepada calon peserta seleksi hakim agung dan hakim ad hoc HAM MA Tahun 2024 yang telah dinyatakan lulus," kata anggota Komisi Yudisial RI Mukti Fajar Nur Dewata dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/2).

Mukti menjelaskan, proses seleksi

yang dilaksanakan saat ini berdasarkan permintaan MA melalui surat di mana lembaga tersebut menyampaikan bahwa membutuhkan hakim agung dan hakim ad hoc HAM. Sebagai respons surat tersebut, KY telah membuka pendaftaran dua kategori tersebut sejak tanggal 30 Januari 2024 hingga tanggal 22 Februari 2024 dan telah diperpanjang hingga 27 Februari 2024.

Selain itu, KY telah membuka pendaftaran dua kategori tersebut sejak tanggal 30 Januari 2024 hingga tanggal 22 Februari 2024 dan telah diperpanjang hingga 27 Februari 2024.

diri dari Kamar Pidana sebanyak 59 calon, Kamar Perdata sebanyak 31 calon, Kamar Agama sebanyak 24 calon, Kamar Tata Usaha Negara sebanyak 8 calon, dan Kamar Tata Usaha Negara (khusus pajak) 11 calon. "Hasil seleksi administrasi diukur dengan indikator kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan. Artinya, bagi yang tidak lolos, berarti tidak sesuai persyaratan atau tidak melengkapi berkas," ujar Mukti.

Nama-nama peserta yang lolos seleksi administrasi, lanjutnya, akan disampaikan secara tertulis pada laman resmi KY di www.komisiyudisial.go.id. Para peserta yang lolos akan melanjutkan ke tahapan seleksi atau tes kualitas yang akan diselenggarakan pada tanggal 7-8 Maret 2024. (Ant/Has)-f

PROGRAM MAKAN SIANG GRATIS

Kabupaten Tangerang Jadi Percontohan

TANGERANG (KR) - Kabupaten Tangerang Provinsi Banten menjadi pilot project atau percontohan dalam penerapan program makan siang gratis bagi siswa SD dan SMP di Indonesia. Alasannya, Tangerang memiliki tipologi sekolah yang berbeda-beda seperti ada di perkotaan, pedesaan, dan pesisir, sehingga paling tepat jadi lokasi percontohan dan nantinya bisa diterapkan di daerah lainnya.

"Dari Pak Penjabat (Pj) Bupati Tangerang menyiapkan tiga tipe sekolah di sini untuk program makan gratis ini, seperti yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini representasi untuk daerah lain di Indonesia," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartato di Tangerang, Kamis (29/2).

Kamis (29/2).

Menurutnya, program makan siang gratis juga bermanfaat bagi para pelaku UMKM, salah satunya menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak. "Ketahanan pangan lokal penting dan jadi asupan di lokal, jangan sampai kita tidak suport ini. Saya senang dari Kantor Menko ingin kerja sama dengan Kabupaten Tangerang," ungkapnya.

Selain itu program tersebut juga akan memenuhi asupan gizi anak menjadi seimbang hingga dapat mencegah dan menekan kasus stunting di Indonesia.

"Satu lagi, saya lihat anak-anak dapat uang jajan Rp 10.000 sampai Rp15.000 itu dipakai untuk berangkat sekolah, beli makanan. Dengan

ada program ini bisa membantu anak-anak. Demikian program ini jadi tepat, gizi dan kalori tepat untuk para pelajar," tutur Airlangga.

Dijelaskan pula, memberikan makan gratis saat ini memang masih dalam pembahasan pemerintah pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 di rapat kabinet. Dari hasil rapat tersebut, belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Sejauh ini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025," pungkaskannya. (Ant/Has)-d

MAJELIS BAWASLU PUTUSKAN

Zulhas Langgar Administrasi Pemilu

JAKARTA (KR) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Program Mudik Gratis 2024. Disediakan ratusan bus untuk mengangkut arus mudik dan balik yang dapat menampung 27.000 orang.

"Pada tahun 2024 direncanakan Pemprov DKI Jakarta melaksanakan Program Mudik Gratis, ada ratusan bus ke-19 kota atau kabupaten di enam provinsi di Jawa dan Sumatera dengan kapasitas lebih dari 27.000 penumpang," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota, Kamis (29/2).

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 259 unit bus untuk arus mudik dan 210 unit bus untuk arus balik. Selain itu, disediakan juga 13 unit truk untuk mengangkut sepeda motor saat arus mudik dan 10 unit truk untuk arus balik. Program Gratis Mudik 2024 yang bersinergi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan pihak pemangku kepentingan terkait (stakeholder) serta para pengusaha ini, menjadi salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memfasilitasi warga DKI Jakarta yang ingin mudik dan balik menggunakan bus.

"Selain mengurangi beban masyarakat, program ini juga menjadi imbuhan bagi masyarakat DKI Jakarta untuk menghindari bepergian jauh membawa barang bawaan berlebih menggunakan kendaraan roda dua. Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan dana sebesar Rp 13 miliar untuk program mudik dan balik Lebaran 2024 menggunakan angkutan umum secara gratis," kata Heru.

Pada tahun 2023, Program Mudik Gratis mengantar penumpang dengan tujuan Bandar Lampung (Lampung), Palembang (Provinsi Sumatera Selatan) serta Kuningan dan Tasikmalaya (Provinsi Jawa Barat). Kemudian Tegal, Pekalongan, Semarang, Kebumen, Cilacap, Purwokerto, Solo, Sragen, Wonosobo dan Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah), Yogyakarta (Provinsi DIY) serta Madiun, Kediri, Jombang dan Malang. (Ant/Has)-d

JAKARTA (KR) - Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait cuti kampanye. Dalam sidang perkara Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/II/2024, Majelis Sidang Bawaslu juga memberikan teguran kepada Zulhas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.

"Memutuskan, satu, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi dalam sidang putusan di Gedung Bawaslu RI Jakarta, Kamis (29/2).

Sebelum memberikan putusan tersebut, Bawaslu berkesimpulan bahwa keikutsertaan Zulhas dalam kampanye pada Selasa (23/1) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan pada Rabu (24/1) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan merupakan pelanggaran. "Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kampanye pemilu yang diatur dalam Pasal 281 Ayat 1 dan Pasal 302 Ayat 2 Undang-Undang Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017)," kata Anggota Majelis Sidang Totok Hariyono dalam sidang tersebut.

Totok menjelaskan Zulhas mendapatkan cuti selama 13 hari seperti tercantum dalam Surat Menteri Sekretaris Negara RI pada 10 Januari 2024, tetapi cuti tersebut untuk keperluan pribadi, bukan kampanye. "Menimbang meskipun terlapor telah mendapatkan persetujuan izin cuti selama 13 kerja pada tanggal 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, dan 31 Januari 2024, dan 5, 6, 7 Februari 2024," kata Totok. (Ant/Has)-f

HARI PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA Serangan Umum 1 Maret, Sejarah Luar Biasa



Aris Eko Nugroho SP MSI

KR-Wawan Isnawan

YOGYA (KR) - Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi sejarah luar biasa bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut berhasil menganulir propaganda politik Belanda di PBB. Dengan strategi serangan itulah, eksistensi kedaulatan RI diakui dunia internasional.

Hal itu dikatakan Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho SP MSI terkait Sinau Sejarah Keistimewaan '1 Maret, Hari Penegakan Kedaulatan Negara', yang diselenggarakan Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Jumat (1/3), pukul 13.00-16.00 di Aula SMA Negeri 10, Jalan Gade-

an No 5, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta, dan ditayangkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewan DIY.

Sinau Sejarah Keistimewaan '1 Maret, Hari Penegakan Kedaulatan Negara' diawali pemutaran video dokumenter berjudul 'Jejak-jejak Perjuangan', dilanjutkan Dialog Keistimewaan 'Hari Penegakan Kedaulatan Negara'.

Selain itu dimeriahkan penampilan bintang tamu serta pentas tari dan musik siswa SMA Negeri 10.

Lebih lanjut Aris mengatakan, Serangan Umum 1 Maret 1949 yang kemudian dikenal sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara melalui Keputusan Presiden No-

mor 2 Tahun 2022, tanggal 24 Februari 2022, bukan peristiwa lokal tapi tingkatnya nasional yang pada akhirnya mempengaruhi situasi politik di dunia internasional. "Layak jika dikatakan bahwa 1 Maret merupakan Hari Penegakan Kedaulatan Negara," katanya.

Serangan Umum 1 Maret 1949 melibatkan berbagai pihak, dan konsistensi warga Yogyakarta ketika peristiwa itu terjadi sangatlah luar biasa.

Dalam peristiwa itu terdapat nilai-nilai penting seperti pantang menyerah, rela berkorban serta memperkokoh persatuan dan kesatuan.

Untuk mensosialisasikan Hari Penegakan Kedaulatan Negara, menurut Aris, dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya melalui media sosial, upacara setiap tanggal 1 Maret, bisa juga melalui forum seminar nasional.

Selain itu diharapkan ada juga ziarah maupun bersih-bersih tetenger sejarah di masa perjuangan yang ada di Yogyakarta yang bisa diperlihatkan kepada generasi muda, kemudian juga ada malam tirakatan untuk menghargai peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.

Mengingat nilai penting sejarah itu pula, Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY mengadakan kegiatan Sinau Sejarah. "Diharapkan, apa yang sudah ada di masa lalu menjadi nilai penting bagi kita," katanya. (Wan)

KEKHASAN UNTUK AGAMA HINDU

Menag Terbitkan PMA Pendidikan Widyalyaya

JAKARTA (KR) - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya atau pendidikan umum kekhasan agama Hindu.

Atas diterbitkannya PMA tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu) I Nengah Duija mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Menag, karena sejatinya pendidikan Widyalyaya ini telah ditunggu-tunggu kehadirannya oleh umat Hindu seluruh Indonesia.

"Terima kasih, karena telah mengeluarkan PMA yang sudah ditunggu-tunggu umat Hindu. Umat Hindu kini resmi memiliki satuan pendidikan umum yang identik dengan madrasah," kata Duija, Kamis (29/2).

Selama ini, pendidikan umat Hindu hanya familiar dengan sebutan Pasraman atau lembaga pendidikan agama dan keagamaan Hindu yang lebih fokus mengajarkan mata pelajaran dari agama Hindu saja seperti halnya pesantren dalam Islam.

Setelah adanya pendidikan Widyalyaya ini, umat Hindu bisa lebih memperlebar jangkauan pendidikan formal bernuansa Hindu yang mana tidak hanya berfokus pada pelajaran agama Hindu, tapi juga mempelajari pelajaran umum, sehingga lulusannya lebih terbuka. Kini, kata Duija, umat Hindu memiliki 2 payung hukum terkait penyelenggaraan pendidikan yakni pendidikan keagamaan (pasraman) dan pendidikan umum dengan kekhasan agama.

"Lengkap sudah saat ini regulasinya. Ada PMA mengenai pasraman yang iden-

tik dengan pesantren dan PMA No 2 Tahun 2024 ini tentang Widyalyaya yang identik dengan madrasah," jelasnya.

Duija mengungkapkan, keberhasilan ini merupakan kerja keras semua pihak. "Tepat saja memang ketika saya menjadi Dirjen, PMA ini keluar. Hal ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa/Ida Shang Hyang Widhi Wasa," ujar Duija.

Pendidikan Widyalyaya ini, kata Duija, nantinya akan berjenjang dari tingkat pendidikan anak usia dini (Pratama Widyalyaya), pendidikan dasar (Adi Widyalyaya), pendidikan menengah pertama (Madyama Widyalyaya) serta pendidikan menengah (Utama Widyalyaya) dan pendidikan menengah kejuruan (Widyalyaya Kejuruan).

Untuk pelajaran yang diajarkan, 60% mempelajari mata pelajaran umum dan 40% mata pelajaran agama. Setara dengan sekolah umum, sehingga menerima siswa dari berbagai latar belakang agama atau kepercayaan.

Duija menjelaskan, Pendidikan Widyalyaya diselenggarakan sebagai upaya untuk mempersiapkan peserta didik yang berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan jenjang lebih lanjut.

"Lulusan Widyalyaya yang setara SMA atau SMK lebih mudah memilih perguruan tinggi, karena kurikulum yang diajarkan sama dengan sekolah umum. Ini adalah bentuk terobosan baru bagi pendidikan Hindu. Pendidikan Widyalyaya adalah konsep pendidikan kedua yang ditetapkan Kemenag RI setelah madrasah," katanya. (Ati)-d



KR-Antara/Harviyan Perdana Putra

GERAKAN PANGAN MURAH: Warga membawa karung beras saat berbelanja pada Gerakan Pangan Murah di Gedung Korpri, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (29/2/2024). Badan Pangan Nasional beserta Bulog dan pemerintah menjual bahan kebutuhan pokok dengan harga paket Rp 85.000 setiap beras SPHP, gula pasir, dan minyak goreng guna menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan serta menekan laju inflasi.